

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLOK MARGU KECAMATAN LINTONG NIHUTA**

**Sutinar Sinaga<sup>1</sup>, Dimpos Manalu<sup>2</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan-Indonesia

<sup>2,3</sup>Dosen Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan-Indonesia

Email Korespondensi: dimposmanalu@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the Village Consultative Body in Development Planning in Dolok Margu Village, Lintong Nihuta District. The type of research used was qualitative research with data collection methods through observational studies, interviews and direct documentation at the Dolok Margu Village Office, while the informants in this study were the Village Head as key informant, Chair of the Village Consultative Body and BPD Members as the main informant, and community leaders as supporting informants. The results of the study show that the implementation of the main tasks of the Village Consultative Body in the governance of the village of Dolok Margu has not been fully carried out optimally based on the law that has been set. Constraints on the non-implementation of the functions of the Village Consultative Body due to factors, lack of knowledge such as incompetent human resources regarding the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) due to the very low level of human resources education, as well as land budget adjustments that have not been optimal and factors facilities that do not yet have a special office for the Village Consultative Council which causes the Village to be in the planning, implementation and supervisory stages not running effectively.*

**Keywords:** *The Role of the Village Consultative Body, Development Planning.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di Kantor Desa Dolok Margu, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa sebagai informan kunci, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota BPD sebagai informan utama, dan Tokoh Masyarakat sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Dolok Margu belum sepenuhnya dilakukan secara optimal berdasarkan UU yang telah di tetapkan. Kendala belum terlaksananya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah karena faktor, minimnya pengetahuan seperti, sumber daya manusia yang kurang kompeten mengenai tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebabkan karena tingkat pendidikan SDM yang sangat rendah, serta penyesuaian lahan anggaran yang belum optimal dan faktor sarana yang belum mempunyai kantor khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa yang menyebabkan Desa dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawas belum berjalan dengan efektif.

**Kata Kunci:** *Peranan Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan.*

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran dan fungsi dari daripada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh peran dan fungsi BPD sebagai salah

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

satu perangkat desa yang sangat penting di Desa. Saat ini fokus utama pemerintah dalam membangun dari Desa sebagai salah satu strategi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan diharapkan berhasil dengan baik. Konsep perencanaan pembangunan yang berhasil adalah apabila keterlibatan banyak pihak sangat banyak, termasuk peran dan fungsi dari BPD sebagai salah satu perangkat dari desa.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa di dalam aturan Permendagri No. 110/2016 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat Desa. Dengan demikian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

Bagaimana fungsi dan peran BPD dalam perencanaan pembangunan adalah latar belakang dari penelitian ini dengan melihat sejauh mana peran BPD sebagai organ dari perangkat desa dengan perencanaan pembangunan dengan melihat kasus di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud metode kualitatif menggambarkan dan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya pada masa sekarang dan cenderung menggunakan analisis. Menurut (Sanafia:1999) tujuan penelitian kualitatif untuk membuat pendaaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi.

## PEMBAHASAN

### Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal keterlibatan proses perencanaan pembangunan di Desa Dolok Margu dilibatkan hal ini dilihat dari partisipasi Badan Permusyawaratan Desa dalam keikutsertaan menghadapi kegiatan rapat Musrenbang. Meskipun dalam tahap proses perencanaan melibatkan semuanya, peneliti juga melihat bahwa dalam pengambilan keputusan tetaplh yang lebih didengarkan adalah Kepala Desa dan semua perangkat Desa Dolok Margu. Hal ini dikarenakan masih melekatnya hubungan kekerabatan itu sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan keputusan yang diambil. Berdasarkan observasi peneliti menyimpulkan bahwa fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dolok Margu belum melaksanakan tugas secara optimal, meskipun sudah melibatkan semua hal namun masih ada kendala yang ditemukan peneliti saat observasi langsung di kantor Desa Dolok Margu.

Pada Tahap Pelaksanaan pembangunan dalam perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah disusun secara matang dan terperinci dalam rapat mengenai perencanaan pembangunan yang telah dianggap siap. Menurut Bapak Anju Silaban selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (45Tahun,SMP), wawancara pada hari Selasa 14 Juni 2022 mengatakan:

“Iya. Dalam pelaksanaan pembangunan semua dilibatkan, maupun itu Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, sesuai apa yang telah direncanakan, bagaimana mungkin setiap apa yang dikerjakan tidak direncanakan misalnya perencanaan pembangunan infrastruktur dan lainnya,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

harus disesuaikan dengan musyawarah, karena setiap aspirasi akan dituangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pembangunan). Namun pada tahap pelaksanaan pembangunan. Peneliti mengamati ada permasalahan yang dimana pada tahap pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan secara maksimal, seperti apa yang dikatakan Bapak Anju. Peneliti melihat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Margu banyak sekali kendala meskipun sudah melibatkan semua elemen tidak menjamin Badan Permusyawaratan Desa berjalan secara maksimal. Dapat dilihat dari segi permasalahan yang terjadi dikantor, peneliti langsung melihat bahwa ada pelanggaran yang terjadi di Desa yaitu dalam proses anggaran yang dimana anggaran untuk pembangunan jalan sudah lama direncanakan namun pada sampai saat ini pembangunan jalan itu belum terialisasikan. Masyarakat sudah mempertanyakan kenapa jalan tersebut belum ada pembaruan. Namun pada permasalahan itu masyarakat tidak terlalu menekan Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan kuatnya hubungan kekerabatan itu yang membuat Peran Badan permusyawaratan tidak berjalan dengan maksimal”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Margu melibatkan semua elemen, melibatkan semua elemen tentu belum bisa menjamin Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan peran dan fungsi sesuai yang telah ditetapkan. Adanya kendala yang di lihat peneliti dalam proses pelaksanaan ialah sebagian yang telah direncana tidak terialisasikan secara maksimal,karena adanya pelanggaran. Namun kuatnya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan itu tidak terlalu menyudutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam permasalahan yang dilakukan hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Pada tahap pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan. Tahap pengawasan merupakan tahapan ketiga dalam perencanaan pembangunan disetiap elemen yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan dan mengawasi berjalannya pembangunan sehingga sesuai yang diharapkan. Bapak Marganda Silaban selaku Kepala Desa (49Tahun,SH) mengatakan:

“Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung , dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan sampai selesai baru melakukan pengawasan. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan dalam hal administrasi seperti pencatatan data informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan proyek dilapangan contohnya absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan pembangunan”.

Ibu Sartika selaku Tokoh Masyarakat (57Tahun, SMP). Wawancara pada hari senin 7 Juni 2022 mengatakan :

“Terkait masalah pengawasan kita mengacu pada tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa, kalau secara luas pengawasan dari masyarakat minim acua, dan sebagian memang tidak tau hal itu, terkait masalah pembangunan ada juga beberapa msayarakat mengelu tentang pembangunan tetapi belum pernah disampaikan secara langsung melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa”.

Bapak Anju Silaban selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (45Tahun, SMP), wawancara pada Selasa 14 Juni 2022 mengatakan:

“Mengenai pengawasan biasanya anggota Badan Permusyawaratan Desa dipanggil satu kali saja pas rapat musrenbang itu, selebihnya terjun langsung mengawasi pembangunan jarang sekali karena biasa tidak dipanggil mungkin karena sudah ada ketua Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa lainnya jadi saya tidak dipanggil apalagi melihat latar pendidikan saya masih ada lulusan SMP jadi kalau terkait fungsi memang masih minim akan hal itu”.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses tahapan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Desa Dolok Margu, yaitu dalam pengawasan dapat dikatakan belum efektif karena proses pengawasan dilakukan secara berskala dengan turun langsung kelapangan tidak melibatkan semua elemen dan kurangnya pengetahuan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan begitupun dengan anggota Badan Permussyawaratan Desa masih ada yang belum paham mengenai tugas dan fungsinya.

## Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa Dolok Margu untuk melihat hal pokok dari penelitian ini dapat ditinjau dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

### a. Tahap Perencanaan

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk memikirkan sebuah masalah dan melakukan penilaian terhadap pembangunan untuk kemudian merencanakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pembangunan desa selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta Badan Permusyawaratan Desa pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan benar-benar dari bawah. Tahap Perencanaan di Desa Dolok Margu dikatakan sudah efektif karena keikutsertaan semua elemen

### b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk implementasi dari apa yang telah direncanakan untuk pembangunan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan bersama dalam rapat musrenbang, dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa Dolok Margu berdasarkan UU yang telah ditetapkan belum berjalan seseuai dengan yang diharapkan, begitu juga dengan langkah penyusunan perencanaan pembangunan antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah belum dilakukan secara demokratis, dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Dolok Margu belum berjalannya sesuai yang diharapkan karena adanya kendala seperti, tidak mempunyai lahan dan kondisi keuangan yang belum memadai atau dikatakan belum memenuhi apa yang diharapkan, serta tingkat SDM dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sangat rendah, sebageian bahkan ada yang berpendidikan SMP. Sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang paham dengan fungsinya dan sebagian besar masyarakat kurang paham juga akan fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Dolok Margu Kecamatan LintongNihuta belum maksimal.

### c. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan tahapan terakhir dalam pembangunan, pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk mengawasi, memperhatikan jalannya setiap proses-proses pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dolok Margu

Pengawasan juga diartikan sebagai proses mengkritis mengevaluasi sehingga pemerintah Desa tidak sewenang-wenang mengambil keputusan dan hasil rapat pembangunan tidak semata-merta bisa diubah ketika sudah terlaksanakan dilapangan mengawasi proses pembangunan sampai pada masalah adminstrasi, terjadinya control, pengawasan serta komunikasi yang baik yang menjadi hambatan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimana dia Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta banyaknya keluhan masyarakat mengenai pembangunan di Desa, maka dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap pengawasan telah berjalan namun dalam sistem pengawasan tidak semuanya dilakukan dengan baik.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

Namun salah satu faktor yang menghambat yaitu eratnya hubungan kekeluargaan serta SDM dari pada anggota Badan Permusyawaratan Desa masih kurang karena tingkat keilmuan yang masih dibawah rata-rata karena mereka hanya sampai pada tingkat pendidikan SMA dan SMP. Pelaksanaan Dolok Margu tentang bagaimana terhadap pelaksanaan Peraturan Desa diantaranya: mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan Peraturan Desa seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, jika terdapat penyelewengan atau pelanggaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan, namun jika pihak yang bersalah atau pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka Badan Permusyawaratan Desa akan melaporkannya kepada Camat dan bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi.

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik, maka fungsi pengawasan di Desa Dolok Margu haruslah benar-benar dapat dilakukan secara maksimal. Profesionalitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggaraan negara dapat dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tentu hal ini akan dapat menjadi hal yang buruk untuk masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan desa di Desa Dolok Margu.

Hubungan keluarga antara Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa peneliti lihat sebagai salah satu akar permasalahan yang terjadi sejauh ini, tidak efektifnya kinerja sesuai peran dan fungsi menurut UU yang telah ditetapkan di Desa Dolok Margu Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah di Desa merupakan salah satu alasan yang mendasar mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus ada, Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan di Desa Dolok Margu yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas dan tanggungjawab dari Badan Permusyawaratan Desa

Penyelesaian persoalan yang diambil dengan cara kekeluargaan dan tidak menempuh upaya pelaporan pihak penyelenggara pemerintahan desa ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat desa, dikarenakan tidak ingin adanya keributan atau kegaduan diantara warga dan masyarakat di Desa Dolok Margu ini, hal tersebut seperti yang disampaikan Ibu Sartika selaku Tokoh Masyarakat (57 Tahun, SMP), wawancara pada hari Senin 7 Juni 2022 mengatakan:

“Di desa ini sebagian besar dari penduduknya saling memiliki hubungan keluarga, alangkah baiknya jika setiap persoalan yang ada dan terjadi di Desa Dolok Margu diselesaikan secara kekeluargaan pula, begitupun persoalan yang terjadi dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, agar tidak ada keributan yang terjadi diantara warga dan masyarakat desa lain”.

Dari persoalan yang terjadi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pemerintahan desa juga menyadari adanya pelanggaran yang terjadi, dibalik arifnya penyelesaian yang dilakukan, sudah seharusnya peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dolok Margu ini harus dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terciptanya pemerintahan yang baik. Ruang lingkup yang menjadi wilayah kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dolok Margu saat ini telah dicoba dibenturkan dengan muatan yang sifatnya emosional kekeluargaan, sehingga terjadi ketidak seimbangan dan ketimpangan di tubuh pemerintahan desa di Desa Dolok Margu ini.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Tahap Perencanaan, Pelaksanaan serta Pengawasan di Desa Dolok Margu Kecamatan LintongNihuta diharapkan pada proses pengimplementasian terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa. Namun pada fakta dilapangan berbicara lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dolok Margu Kecamatan LintongNihuta tidak dapat

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 9 Nomor 4 Juni 2023

menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintahan desa Dolok Margu

## REFERENSI

- Attas, Nur Raodah. *Peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan di desa balubu kecamatan belopa–kabupaten luwu*. 2020. Phd thesis. Universitas muhammadiyah palopo.
- Awaeh, Stewar; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, joSef. Peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan (studi di desa sereh 1 kecamatan lirung kabupaten talaud). *Jurnal eksekutif*, 2017, 1.1.
- Dauwole, e., Kaawoan, J., & Sendow, y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan (suatu studi di desa tolabit kecamatan kao kabupaten halmahera utara). *jurnal eksekutif*, 2(2).
- Hadiwijoyo, Suryo S. (2019). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Kharisma Putra Utama Offset. Depok
- Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*. (Erlangga 2011)
- Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 291-300.
- Rodhiyah, siti; harir, muhammad. Peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembentukan peraturan desa di desa krandon kecamatan guntur kabupaten demak. *Jurnal pembaharuan hukum*, 2016, 3.3: 291-300.
- Saruan, marselino j. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di desa kumelembuai kabupaten minahasa selatan." *jurnal politico* 10.4 (2021). dauwole, estepanus, johannis kaawoan, and yurnie sendow. "peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan (suatu studi di desa tolabit kecamatan kao kabupaten halmahera utara)." *jurnal eksekutif* 2.2 (2017).
- Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *PERSPEKTIF* 6.2 (2017): 41-52.
- Wiguna, Yoga Teja; Dewi, Rosmala; Angelia, nina. Peranan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa. *Perspektif*, 2017, 6.2: 41-52.
- Yustika Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. Cetakan pertama. (Jakarta selatan: kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)